

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Judul

Agar dapat memberikan kejelasan mengenai maksud dari judul yang diangkat, maka setiap kata dari judul tersebut perlu dijabarkan pengertiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga : Menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi” sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan adalah merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. (Blau & W, 1962)
2. Pemasyarakatan : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (UU No. 12 Th. 1995 – tentang Pemasyarakatan).
3. Kelas : tingkatan tertentu dalam masyarakat dan budaya (arti sosial).
4. Wanita : Sosok yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki kelemahan lembut serta penuh kasih sayang.
5. Yogyakarta : Ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubawana dan Adipati Paku Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar ketiga di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. (Wikipedia, 2016)

- 6. Penekanan : Kata yang dipentingkan atau harus lebih ditonjolkan dari unsur-unsur yang lain.((KBBI, 2016)
- 7. Arsitektur : Seni yang dilakukan oleh setiap individual untuk berimajinasikan diri mereka dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut.((Wikipedia, 2016)
- 8. Bioklimatik : "Ilmu yang mempelajari hubungan antara iklim dan kehidupan terutama efek dari iklim pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari" (Yeang, Biolimatic Skyscapers, 1994)

1.2 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu setiap gerak langkah pergaulan hidup manusia dalam hubungannya dengan hubungan bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat. Di Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim dikenal dengan istilah Hukum Privat dan Hukum Publik. (Moeljanto, 1982)

Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. (Kansil, 1986)

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di dalam gedung penjara yang di Indonesia dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (NAPI) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Narapidana merupakan masyarakat yang memiliki kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana tidak memiliki ruang gerak yang dibatasi oleh tembok penjara. Namun narapidana tetap manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat. Seorang narapidana meskipun telah kehilangan kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut dijamin oleh negara, seperti disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Sebagai warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari empat sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan

pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terpidana (narapidana) dimana sistem ini merupakan sistem tujuan dari pidana penjara. Dalam rumah narapidana, orang yang bersalah diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu dengan harapan terpidana (narapidana) benar-benar bertaubat dan jera, sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari.

Penjabaran tersebut mengemukakan bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang yang tersesat yang mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-hak layaknya manusia pada umumnya. Wanita yang kita kenal memiliki hati dan sikap yang lemah lembut, ternyata dapat melakukan suatu tidak kejahatan. Wanita yang melakukan suatu tindak pidana yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan, dimana narapidana wanita jelas berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana mempunyai hak kodrati seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi sistem pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan untuk wanita pada setiap daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin Hak Asasi Manusia para narapidana khususnya wanita. Pasalnya, selama ini di beberapa daerah atau kota belum memiliki Lapas khusus wanita, padahal jumlah tahanan dan narapidana wanita cukup banyak. Sedang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita ini sebagai salah satu unit pelaksanaan pemasyarakatan, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Salah satu daerah yang belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita adalah di Yogyakarta.

Karena belum adanya LAPAS khusus wanita, selama ini tahanan dan narapidana wanita dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau dikenal LAPAS Wirogunan. Dari data yang diunggah di

<http://smslap.ditjenpas.go.id/> pada Sabtu (2/1/2016) tercatat jumlah tahanan dan narapidana wanita sebanyak 96 orang. Di Lembaga Pemasyarakatan itu tak hanya ada tahanan dan narapidana wanita namun juga digunakan untuk tahanan dan narapidana pria, sehingga menimbulkan kesenjangan Hak Asasi Manusia khususnya pada narapidana wanita di Yogyakarta tersebut.

Tabel 1.1 Kenaikan Tingkat Kejahatan oleh Perempuan di Yogyakarta

Kota	Tahun	Jumlah Narapidana/Tahanan (Wanita)
Yogyakarta	2011	19 orang
	2012	21 orang
	2013	51 orang
	2014	68 orang
	2015	75 orang
	2016	96 orang

(Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id>)

Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang digariskan dalam GBHN tentang hukum dimana disebutkan sarana dan prasarana hukum terus ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya agar dapat mendukung upaya pembangunan hukum secara optimal, maka salah satunya adalah peningkatan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sarana dan prasarana hukum (GBHN, 2016).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Yogyakarta akan mendukung sistem Pemasyarakatan diwujudkan dengan bentuk bangunan yang lebih mengutamakan pendekatan segi pembinaan dengan tetap mempertahankan segi kenyamanan dan keamanan, memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dan berlokasi di tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Penekanan desain konsep arsitektur bioklimatik dipilih karena dapat menyesuaikan terhadap kondisi iklim, menggunakan arsitektur setempat dan

menerapkan teknologi efisiensi sehingga bangunan yang dihasilkan nyaman bagi pengguna, ramah lingkungan, dan hemat energi. Hal tersebut perlu adanya perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan wanita di Yogyakarta, yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah digariskan pemerintah dan juga memperhatikan kodrat penghuninya sebagai seorang wanita dengan menggunakan penekanan desain konsep Arsitektur Bioklimatik.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan ruang yang sesuai untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita?
2. Bagaimana wujud rancangan pengembangan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita dengan penerapan arsitektur bioklimatik?
3. Di manakah lokasi yang tepat untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita ?

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam perancangan pembangunan LAPAS wanita di Yogyakarta ini adalah:

1. Membuat rancangan penataan ruang pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai untuk wanita.
2. Menerapkan arsitektur bioklimatik pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menempatkan Lembaga Pemasyarakatan pada site yang sesuai, agar tercipta kenyamanan dan keamanan dengan lingkungan sekitarnya.

1.4.2 Sasaran

1. Merancang ruang dan fasilitas lainnya dengan mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami.

2. Perencanaan pembangunan LAPAS ini dibangun di daerah yang akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat lingkungan sekitar juga, tidak hanya untuk penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Penempatan lokasi yang tepat akan menunjang sarana dan prasarana serta aktivitas para penghuni LAPAS

1.5 Lingkup Pembahasan

Pembahasan permasalahan ditekankan pada perancangan arsitektural bangunan Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita dengan penerapan fasilitas penunjang yang telah diatur, terutama pada area-area pembinaan yang berhubungan dengan proses pembinaan narapidana dengan berkonsentrasi pada kenyamanan penghuni. Pembahasan dibatasi pada pengertian secara umum sedangkan pada perancangannya dititik beratkan pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan, mencakup aspek fungsional, teknis, dan arsitektural. Pembahasan diluar bidang arsitektur yang masih melatar belakangi, mendasari dan berkaitan dengan faktor-faktor perancangan fisik akan dibahas secara garis besar dengan asumsi yang rasional dan logis.

1.6 Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar perencanaan dan perancangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan:

1. Survey lapangan sebagai pengamatan langsung terhadap obyek studi banding bertujuan mendapatkan data primer sebagai acuan perencanaan dan perancangan yang nantinya akan dilakukan.
2. Studi literature dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, seperti studi kepustakaan mengenai Lembaga Pemasyarakatan, standart ruang, penekanan desain serta pengumpulan data informasi dan peta dari instasi terkait, serta literature yang berasal dari internet.

3. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk mengetahui kondisi lapangan secara nyata dan sekaligus melengkapi data primer mengenai pokok pembahasan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) ini adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Berisi tentang deskripsi judul, latar belakang pembahasan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika pembahasan.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	Berisikan tentang kajian obyek yang disesuaikan dengan judul, studi kasus pada lapangan maupun berasal dari literature.
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN (DATA)
	Berisi mengenai lokasi atau data fisik yang sesuai dengan RBWK, RUTRK terbaru, data sebaran aktifitas ; penduduk ; dan lingkungan sosial lain atau data non fisik (data lima tahun terakhir dari BPS, kantor dinas, DPU setempat, dan sebagainya), gagasan perancangan.
BAB IV	ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
	Berisi mengenai analisa dan konsep makro yang mencakup lingkungan yang lebih luas seperti ; kota atau kawasan, analisa dan konsep mikro, yaitu; analisa dan konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep massa, analisa dan konsep tampilan arsitektur (eksterior dan interior), analisa

dan konsep struktur dan utilitas, analisa dan konsep penekanan arsitektur (sesuai judul)

DAFTAR PUSTAKA

Berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian dan pembuatan SKPA